

**IMPLEMENTASI KOLABORASI MODEL PENTAHHELIX DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN UMKM EX LOKALISASI DOLLY PADA
MASA PANDEMI COVID 19
(Studi Kasus DS.Point)**

Supriyanto¹, Fredy Iskandar²

Supriyanto@uwp.ac.id¹, fredyiskandarr9@gmail.com²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Putra

Abstract

After the closing of Dolly's localization in 2014, the Surabaya city government has purchased several guesthouses in Dolly and converted them into various kinds of craft production sites. The location which was previously a place of prostitution with the largest income in Southeast Asia was later turned into the largest MSME center in Surabaya. The Surabaya government continues to provide assistance to residents of EX Localization in order to create a better image, namely by inviting local community members to become MSME actors. DS.Point (Dolly Saiki Point) is a silent witness to the dark history of the City of Surabaya, but has now been designated by the Surabaya City Government as an area for commercial, economic, and tourism activities. DS.Point (Dolly Saiki Point) is under the auspices of the Surabaya City Food and Agriculture Security Service, which makes it a souvenir center that accommodates processed products or products from MSME activists from residents of EX Lokaliasai Dolly. The research method used is descriptive qualitative which refers to the identification of distinguishing traits or characteristics of a group of people, objects, or events in order to provide an overview of the Implementation of the Pentahelix Model Collaboration in the Context of Improving the Empowerment of MSMEs Ex Dolly Localization During the Covid-19 Pandemic. Data collection techniques were carried out through the process of observation, interviews and documentation. The theory used is Collaborative Governance. The results of the study show that the roles played by the penta helix actors are quite good and the collaboration created between them has been going well, this can be seen by the inability for the actors to stand alone in increasing the empowerment of SMEs Ex Dolly Localization. This also has a good impact on the perpetrators of the Ex Dolly Localization MSMEs under the auspices of DS Point (11pt, single line spacing, 1 paragraph).

Keywords: *Collaborative Governance, Pentahelix, UMKM Ex Dolly Localization*

PENDAHULUAN

Pandemi *corona virus disease (Covid-19)* membawa akibat perubahan yang sangat besar hampir di seluruh dunia maka dibutuhkan kolaborasi model pentahelix untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Dampak perubahan akibat pandemi tersebut

menimbulkan perubahan norma serta praktik baru dalam susunan ekonomi, sosial, dan politik, mulai dari level perorangan, komunitas, kelembagaan, dan hubungan antarbangsa. Berdasarkan data analisis *The Economist* (ed. 16-22 Mei 2020) telah terjadi kemunduran secara global sebagai akibat menguatnya pendekatan nasionalis dalam

menangani pandemi dan kecenderungan *self-sufficiency*. Keadaan yang disebut melalui *the reversing of globalisation* ini menjadi salah satu normalitas baru dalam hubungan antarbangsa sebagai dampak COVID-19 (Mas'udi dan Winanti,2020), Kebetulan di sela-sela meluapnya pergerakan intensif manusia dan benda serta jasa dalam sebagian dasawarsa terakhir. Normalitas lainnya yang sudah mulai terbentuk adalah pergeseran mekanisme pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan bisnis proses industri, yang kesemuanya mengadopsi teknologi digital (McKinsey & Company, August 2020). Pandemi juga secara cepat telah melahirkan struktur ketimpangan sosial dan ekonomi baru, di tengah adanya keyakinan akan munculnya peluang-peluang transformasi dan struktur sosial yang lebih setara (Schifferes, 2020; Tabner,2020). BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat perekonomian Indonesia melemah sampai minus 5,32% di triwulan II-2020 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 (year on year/yoy). Parahnya lagi, zona mengkonsumsi rumah tangga yang sepanjang ini jadi penarik angka perekonomian, saat ini wajib tergerus menjadi minus 2,96% (yoy). Kemampuan membeli masyarakat sangat tergerus dampak wabah pandemi Covid-19 yang diberitahukan mulai pertengahan Maret 2020 lalu, hingga kegelisahan untuk bertemu melalui kemunduran perekonomian pun terbuka lebar. Informasi dari World Health Organization

(WHO) tentang Covid-19 pada 4 Agustus 2020 mencatat, jumlah peristiwa akibat Covid-19 di Indonesia naik hingga sebanyak 113.134 kasus. Angka ini jauh melampaui Cina yang masih di 88.574 kasus. Sebanyak 5.302 orang meninggal dunia di Indonesia dan 4.678 orang di Tiongkok. Pemerintah mengklaim sudah mengupayakan bermacam upaya menurunkan virus corona, tetapi penyebarannya terus meningkat. Wilayah zona merah senantiasa bergantian meneruskan pelonjakan kasus. Kalau diperkirakan penyebaran terjadi kira-kira 1.000 kasus per hari, oleh karena itu per 7 Agustus sampai 31 Desember 2020, terjadi kenaikan hingga 146.000 kasus baru, hingga akhirnya mencapai angka 259.134 kasus. Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan baru bagaimana keseriusan pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19. Peningkatan kasus ini menunjukkan beberapa indikasi serius. Pertama, kurang efektif komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dalam mengedukasi, mengarahkan, menegur serta menegakkan disiplin kepada warga yang tidak menyimpan atensi pada arahan pemerintah. Kedua, dampak wabah Covid-19 kepada dunia usaha mendesak timbulnya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Pada kejadian ini, dunia usaha tidak dapat diperdebatkan sebab wajib “menjamin keselamatan pribadi” dari terjangkit wabah Covid-19. Bahkan lembaga-lembaga keuangan internasional pun sudah

memprediksi jika perekonomian dunia menghadapi depresiasi serius. Ketiga, ketidakdisiplinan masyarakat kepada arahan pemerintah melemahkan usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kejadian tersebut dapat diakibatkan banyak faktor, contoh ketika masyarakat yang mencoba menetap melalui mencari kesempatan kerja dari beberapa sektor, hingga seringkali tidak mematuhi protokol kesehatan pada era kebiasaan baru yang berlaku. Selain itu, ada kemungkinan sebagian masyarakat yang berharap pada bantuan pekerjaan dari pemerintah, merasa kecewa sebab harapan itu tak kunjung tiba. Sementara itu pemenuhan kebutuhan hidup terus menekan, serta dampaknya kurang mematuhi arahan pemerintah. Pemicu yang lain mungkin pula terdapatnya perilaku antipati terhadap kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial untuk warga yang terkena efek Covid-19. Kebijakan itu dikira tidak pas target, karena banyak warga yang sebetulnya terdampak malah tidak memperoleh bantuan pemerintah. Hal lain yang dicoba oleh kelompok masyarakat yang sering memilih jalan berbeda dari kebijakan serta arahan pemerintah. Hingga bukan lagi soal apakah kebijakan pemerintah pas atau tidak, namun lebih pada “yang penting menentang” kebijakan pemerintah. Keempat, upaya golongan periset Indonesia yang belum sukses menciptakan vaksin Covid-19 pantas diperkirakan selaku salah satu bentuk kurang

integratifnya riset-riset akademisi Indonesia. Lumayan banyak ditemui studi tanpa fokus serta arah yang jelas. Penelitian dicoba semata-mata guna penuh tugas perkuliahan serta menemukan statement kelulusan dari Universitas. Kelima, pemberitaan media massa yang setiap hari menginformasikan data teranyar kasus baru Covid-19, harus diakui cukup memengaruhi masyarakat. Data yang selalu diinformasikan membuat sebagian warga terus menjadi khawatir melalui keadaan wabah Covid-19. Dikala media memberitakan kematian seseorang Guru Besar di Universitas Gadjah Mada yang diperkirakan akibat Covid-19, sekelompok mahasiswa pascasarjana di kampus itu, ikut tenggelam dalam arus kekhawatiran terhadap virus corona, sehingga himbauan buat di rumah saja jadi opsi terbaik guna dijalankan. Sebetulnya, pemberitaan media massa berupaya membagikan data terbaru tentang pertumbuhan pandemi Covid-19 yang menyerang dunia tetapi perasaan khawatir serta kegelisahan warga begitu kokoh mencengkram logika berpikir. Sepatutnya warga dicerdaskan melalui data dari media massa, paling utama dalam menghindari penularan Covid-19, tetapi kita bisa apa ketika kegelisahan serta ketakutan begitu menggunung. Permasalahan Covid-19 pada daerah Surabaya sedang berlanjut meningkat sampai saat ini. Tebaran menyeluruh pada 5 daerah di Kota Surabaya. Informasi akhir Surabaya Lawan Covid-19 di tanggal 17 Februari 2021, terdapat akumulasi

hingga 0,26 persen permasalahan positif di Surabaya. Total kasus positif di Surabaya saat ini adalah 20,832 kasus. Selain itu, 19,270 terkonfirmasi sembuh dan 1,313 meninggal dunia (Yusron Fahmi, 2021).

Berikut sebaran Covid-19 per wilayah di Surabaya :

Tabel 1.1 Data sebaran Covid per 19 Februari 2021

NO	LOKASI	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
1	Surabaya Barat	3.347	3.136	184
2	Surabaya Pusat	2.110	1.899	186
3	Surabaya Utara	2.908	2.685	202

Sumber Tabel : <https://surabaya.liputan6.com/read/4486164/catat-20832-kasus-positif-cek-sebaran-covid-19-di-surabaya-hari-ini>

Selama periode pertama 2020, pemerintah Indonesia sudah mempraktikkan bermacam usaha serta aturan dalam menanggulangi wabah Covid-19 melalui tekanan yang bertumpu pada zona kesehatan. Perihal tersebut nampak pada pembuatan Gugus Tugas Percepatan Penindakan Covid-19 lewat Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 bertepatan pada 13 Maret 2020. Tidak hanya itu, pemerintah menghasilkan bermacam aturan, diantaranya mengeluarkan bermacam ketentuan serta panduan / protokol kesehatan, Propaganda mencuci tangan - Pemakaian masker - jaga jarak secara ruitn, penetapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pada bermacam daerah, larangan pulang kampung selama Hari Raya Idul Fitri, mempersiapkan lab guna uji Covid-19, melaksanakan uji Covid-19 pada bermacam lokasi, sampai pengukuhan sistem era baru. Meneruskan apa yang telah dicoba di Periode Pertama 2020, pemerintah berkelanjutan melaksanakan usaha menurunkan gelombang peningkatan permasalahan di Periode kedua 2020 melalui perluasan lingkup rencana, yaitu

mencantumkan penindakan akibat Covid-19 di bidang ekonomi. Pada sektor kesehatan, pemerintah selalu mempromosikan sikap Tiga M, yaitu mengenakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun.

Pada 20 Juli 2020, pemerintah, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 membentuk Badan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Badan tersebut memperbesar cakupan serta kewajiban yang sepanjang ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Covid-19). Pada Badan tersebut, ada Badan Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (STPC-19), dan Satuan Tugas Pemulihan serta Transformasi Ekonomi Nasional. Melalui Peraturan Presiden tersebut, nama Gugus Tugas Covid-19 diganti jadi STPC-19 dengan kegunaan serta susunan yang serupa. Melalui ekspansi rencana kebijakan tersebut, usaha menanggulangi Covid-19 pada sektor kesehatan senantiasa selalu dilaksanakan. Usaha tersebut berjalan beriringan melalui 2 sasaran biasa penindakan Covid-19 yang diterbitkan oleh World Health Organization (WHO), yaitu mengurangi sebaran Covid-19 serta kurangi berkurangnya nyawa manusia sebab Covid-19. Berbagai kegiatan untuk menurunkan penyebaran virus dapat dirangkum dalam lima kata kunci, yakni temukan, tes, isolasi kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. Sebaliknya, aktivitas guna kurangi kematian dijalankan melalui perluasan pelayanan kesehatan, menaikkan

fasilitas kesehatan vital/utama, dan menguatkan tenaga kedokteran.

Guna menunjang rencana penanggulangan Covid-19, pemerintah menaksir uang sejumlah Rp 695,2 triliun di tahun 2020. Melalui jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun ditempatkan guna sektor kesehatan. Secara konkret, kebijakan pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 pada periode kedua 2020 dapat dilihat dari berbagai peraturan, baik regulasi dan protokol, yang diterbitkan dalam kurun waktu Juli hingga Desember 2020 serta ditempatkan pada web Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (STPC-19).

Konsep Penta Helix dimengerti selaku Kerja sama lima golongan silih terpaut serta bersama ketika penambahan gagasan baru. Yaitu, komponen pemerintah; dunia usaha; akademisi (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997); masyarakat (Afonso, Monteiro, & Thompson, 2012); dan media massa (Halibas, et.al., 2017). Harus diakui bahwa Indonesia telah mengimplementasikan konsep Penta Helix, meski secara parsial. Fokus pertama dikala ini, bersama mendirikan negara melalui kewajiban tiap-tiap elemen secara seimbang. Hingga mendesak Penta Helix selaku aturan antisipatif guna menanggulangi wabah ini, lewat turun tangan seluruh elemen, diantara kekhawatiran dunia tentang kapasitas Indonesia menangani serta menanggulangi Covid-19.

Pemerintah Kota Surabaya selama ini memberikan perhatian penuh kepada warga terdampak pasca penutupan Lokalisasi Jarak-Dolly pada 2014. Warga yang dulu menggantungkan hidup dibalik ramainya bisnis prostitusi, kini menjadi penggiat usaha mandiri. Menteri Sosial sekaligus Mantan walikota surabaya Ibu Tri Rismaharini mengungkapkan virus corona telah memberikan dampak pada ekonomi Surabaya. Risma mengatakan, yang paling terdampak adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kemudian sektor jasa yakni hotel dan restoran. Risma menuturkan, sejumlah langkah telah diterapkan untuk menangkal dampak tersebut. Sebutnya, penggratisan biaya air untuk masyarakat miskin dan yang terimbas. Kemudian, ada juga keringanan pajak untuk restoran dan hotel selama 2 bulan. Pemkot Surabaya juga mulai menata pasar-pasar untuk menerapkan social distancing, disiplin memakai masker dan cuci tangan. Pemkot surabaya juga menyiapkan peluang-peluang kerja untuk menanggulangi dampak masyarakat yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja (Achmad:2020).

Pasca penutupan lokalisasi Dolly pada tahun 2014, pemerintah kota Surabaya telah membeli beberapa wisma yang ada di Dolly dan dirubah menjadi berbagai macam tempat produksi kerajinan. Lokasi yang sebelumnya merupakan tempat prostitusi dengan pendapatan terbesar se-Asia Tenggara kemudian dirubah menjadi sentra UMKM

terbesar di Kota Surabaya. Pemerintah Surabaya terus melakukan pembinaan terhadap warga Ex Lokalisasi daalam rangka mewujudkan citra yang lebih baik yakni dengan mengajak warga masyarakat sekita menjadi pelaku UMKM.

DS.Point (Dolly Saiki Point) adalah saksi bisu dari sejarah kelam Kota Surabaya, namun kini telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi area untuk kegiatan komersil, ekonomi, serta pariwisata. DS.Point (Dolly Saiki Point) dinaungi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang mana menjadikannya sebagai sentra pusat oleh-oleh yang menampung hasil atau produk olahan dari penggiat UMKM dari warga EX Lokaliasai Dolly. Hingga April 2021 terdapat 39 UMKM yang bekerja sama dengan DS.Point yang mana 39 UMKM tersebut merupakan warga EX Lokalilsasi Dolly yang bertempat tinggal di Kecamatan Sawahan. Terdapat berbagai macam produk yang dihasilkan, mulai dari Kuliner, Fashion, Aksesoris dan lain-lain. Berikut adalah data dari 39 UMKM EX Lokalisasi yang berada di DS.Point (Dolly Saiki Point) yang juga merupakan Program Binaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Tabel 1. 2 Data Pelaku UMKM Ds Point

No	Nama UMKM	Nama Pemilik UMKM	Produk
1	ALPUJABAR	Sutrisno	1. Kain Batik 2. Pasmina Batik 3. Sepatu Batik

2	ARMITA	Gatoto Subiantoro	1. Lampu Paralon 2. Vas Paralon 3. Toples Paralon 4. Kotak Paralon
3	BETY CRAFT	Bety Maya Prasanti Efendi	1. Dompot 2. Tempat Tisu 3. Bros
4	BATIK JUMPUT PUTAT JAYA	Susiati	1. Sal Jumput 2. Kain Jumput
5	BATIK JUMPUT BANYU URIP	Sunarsih	1. Kain Jumput 2. Baju, Outer, Kaos 3. Pasmina
6	BUMBU RUJAK CAK MIMIN	Dian Arieswati	Bumbu Rujak
7	COOL YES	Sulasih	Jamu Serbuk
8	DAPUR MAK RASKA	Siti Aisyah	1. Bumbu Pecel 2. Kue Kering 3. Kue Basah
9	DENGG JALLY	WIWIK RAHAYU	Udeng Batik
10	DHIKA FOOD	Nur Sholihah	Garlic Herbal
11	DJADUL	Sulton Hadi Slamet	1. Hiasan 2. Lukisan 3. Gantungan 4. Kaos Lukis
12	F dan D	Fitriyah Budi Angga	Daur Ulang
13	SAMBAL HERDY	Diah Nandrawati	Sambal Ijo
14	IJO PANDAN	Anik Yusmani	1. Tisrut 2. Salad 3. Kue Kering 4. Kue Basah
15	IN DATA	Arif	Kaos Sablon
16	INTAN COL	Sri Sulistyowati	Bunga Acrilic
17	ISTANA COL	Siti Ma'rifah	1. Baju Kelelawar 2. Batik Ecoprint
18	JARAK ARUM	Fitria Anggraeni Lestari	1. Kain Batik 2. Baju Wanita 3. Rajut 4. Kalung 5. Kemeja
19	BANG JARWO	Jarwo Susanto	1. Tempe 2. Nugget Frozen 3. Buku 4. Kaos
20	JEHAN	Nanik Suhariyati	1. Hijab Lukis 2. Hijab Ecoprint
21	KALSIA	Fitriah Lailatul Khoiriyah	Ice Cream
22	LAVA COL	Sumiati	Kain Batik
23	LIMA JAYA	Supardiyo	Gantungan Kunci
24	LUNART	Sri Mulyani	1. Tas 2. Bros 3. Dompot
25	KUB MAMPU JAYA	Atik Triningsih	Alas Kaki
26	OMA JAMU	Dyah Puspitaloka	Jamu Minuman Herbal
27	Orumy	Hariani	Minuman Rumput Laut
28	SAE	Muhammad Towi	1. Gantungan 1. Tas
29	PITA DOLLY	Rohminah	1. Baju Koko 2. Kaos 3. Sepatu Sulam 4. Hijab 5. Bros 6. Kalung 7. Bantal 8. Srundeng
30	SAMIJALLY	Laksono Ariati	Keripik Samijally
31	JH	Novia Andriani	Minuman Sari Dele
32	SAWAHAN	Parni Mira Tania	1. Puding Sedot 2. Kue Kering
33	SEGQUEL	Devi Ayu Lestari	Kripik Kulit Kebab
34	VITRI ASSECORIES	Peny Vitri Saumuwaty	1. Gelang 2. Kalung 3. Bros
35	WARNA AYU	Siti Sulaikah	Kain Batik
36	YANA TASTE	Nuryana Rahmayati	Bumbu Nasi Bakar
37	YESSY	Asiyati	1. Bawang Goreng 2. Jus Buah
38	ZORLA	Wijiarti	Kain Batik
39	MINUMAN SEHAT	Fhani Aprilia	Jus Buah

Sumber : Data Dolly Saiki (DS.Point)

A. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan metode supaya suatu kebijakan bisa menggapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Guna menerapkan kebijakan publik, terdapat 2 (dua) opsi langkah yang terdapat, ialah langsung menerapkan dalam wujud program ataupun lewat perumusan kebijakan derivat ataupun turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang umum dalam manajemen, khususnya manajemen zona publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) menjelaskan penerapan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk

mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

B. Konsep Collaborative Governance

Salah satu bentuk kerjasama dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara *independent*. Menurut roucek dan waren kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Sedangkan *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Kolaborasi dapat diartikan sebagai kerjasama, interaksi, kompromi oleh beberapa pihak yang terkait baik itu antar aktor, antar organisasi atau antar institusi maupun lembaga kelompok yang juga menerima manfaat dari adanya strategi yang

dilakukan oleh pemerintah daerah baik penerimaan manfaat secara langsung maupun tidak langsung tentunya dalam hal ini semua pihak memiliki tujuan yang sama terkait apa yang mereka ingin capai dalam kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan.

Menurut pendapat Ansell dan Grash “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods.*” *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana setiap lembaga atau institut terkait bekerja sama berdasarkan pembagian perannya masing-masing dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat.

Dari definisi Ansell dan Grash tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci yang menetapkan pada enam karakteristik, yaitu: Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik, peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik. Peserta

terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik, forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama, forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Karakteristik kolaborasi tersebut tetap menunjukkan bahwa pemerintah sebagai *leading sector*, meski melibatkan aktor non pemerintah. Selain itu, kolaborasi harus dilakukan dalam bentuk formal dan bersifat konsensus serta dilaksanakan baik dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, maupun dalam konteks manajemen publik. Disisi lain, Emerson, Nabatchi dan Balogh mencoba mendefinisikan *collaborative governance* dengan lingkup yang lebih luas yaitu melalui sisi administrasi publik, perencanaan, manajemen publik dan manajemen lingkungan.

Menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh proses dan struktur kebijakan publik dalam membuat keputusan dan manajemen mengikutsertakan orang secara konstruktif dan melewati batasan-batasan lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau publik, swasta

dan lingkungan kewarganegaraan. Hal ini tidak membatasi *collaborative governance* untuk hanya melibatkan pemerintah dan aktor *non-state* (bukan pemerintah) dan bisa juga dalam bentuk kerjasama antar pemerintah atau *multi-partner governance*. *Collaborative Governance* juga memungkinkan adanya keterlibatan atau partisipasi *civil society* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari paparan definisi konseptual menurut para ahli tentang *collaborative governance* diatas dapat disimpulkan bahwa collaborative governance adalah Proses kerjasama atau kolaborasi yang didalamnya terdapat keterlibatan *state actor* (pemerintah) dan *non-state actor* (swasta, lembaga masyarakat ataupun institusi non-pemerintah lainnya) yang memiliki kepentingan masing-masing secara bersama-sama turut serta dalam proses pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang mana pihak-pihak tersebut akan saling mengisi satu sama lain untuk menjawab kelemahan sistem pemerintahan sebelumnya yang dapat dikategorikan tradisional dan kurang efektif.

C. Perkembangan Penta Helix

Penta helix merupakan perluasan dari strategi *triple helix* dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga non profit

dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kolaborasi sinergis tersebut diharapkan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara sinergis. *Triple Helix* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995, Etzkowitz dan Leydesdorff memperkenalkan model *Triple Helix* dengan unsur *Academics*, *Business Sector*, dan *Government*. Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan inovasi adalah bidang Industri. Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan pengetahuan yaitu bidang Universitas. Kemudian berinteraksi dengan bidang ketiga yaitu Pemerintah. Ketiganya bekerjasama melalui pendekatan *top-down* agar terciptanya inovasi yang dapat meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara. Penggunaan model *Triple Helix* dulunya direkomendasikan untuk pengembangan ekonomi, model *Triple Helix* mencakup 3 faktor penting untuk memulai bisnis, yaitu: pemerintah, perusahaan dan universitas. Karena kebutuhan untuk pengembangan perusahaan yang lebih kompetitif dan ekspor ke pasar dunia, penerapan model *Quadruple Helix* direkomendasikan untuk pengembangan dan kemakmuran sebuah perusahaan (Tonkovic dkk, 2015:6).

Triple Helix kemudian dikembangkan lagi dengan ditambahkan

satu unsur, *Civil Society* atau komunitas yang selanjutnya berubah menjadi *Quadruple Helix*, guna mengakomodasi perspektif masyarakat. Konsep *quadruple helix* dikembangkan dengan mempertahankan interaksi dari *triple helix* model (jaringan iptek antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah) serta melibatkan masyarakat sipil secara utuh dalam sistem. Di Indonesia sendiri model *quadruple helix* ini kemudian ditambahkan satu unsur lagi yaitu media yang kemudian menjadi pelengkap unsur *penta helix*, karena dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, Media (baik media konvensional maupun media sosial) memegang peran signifikan meskipun tetap merupakan elemen yang independen atau tidak langsung terpengaruh oleh unsur-unsur yang lainnya dalam melaksanakan bagian atau fungsinya. Adapun kajian literatur sebagai pelengkap hasil penelitian kualitatif terkait dengan model *pentahelix* pada dasarnya merupakan kesepakatan formal atau informal dua atau lebih organisasi untuk meningkatkan kompetensinya melalui kombinasi sumber daya yang dimilikinya dengan para mitranya.

Berdasarkan beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa *Colaborative pethahelix* adalah kerjasama, interaksi,

kompromi oleh beberapa pihak yang terkait baik itu antar aktor, antar organisasi atau antar institusi maupun lembaga kelompok yang juga menerima manfaat dari adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik penerimaan manfaat secara langsung maupun tidak langsung tentunya dalam hal ini semua pihak memiliki tujuan yang sama terkait apa yang mereka ingin capai dalam kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik, forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama, forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

D. Kolaborasi Model Pentahelix di Indonesia

Penta Helix di Indonesia sendiri mulai dikembangkan pada 2016 melalui gagasan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam Siti Nurulwahida (2019) dengan sinegritas GBCAM (*governance, bussines, comunity, academy and media*) yang kemudian lima unsur ini akhirnya dijadikan salah satu model

pengembangan pariwisata. Gagasan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Konsep *Penta Helix* sendiri dituangkan ke dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pada bab I Pendahuluan, bagian pengertian umum no 7 bahwa Ekosistem pariwisata adalah rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimalisasi peran *business, government, community, academic, and media* (BGCAM).

Menurut Soemaryani (2016) Model pentahelix merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal

mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Rampersad, Quester, & Troshani, dalam Halibas, Sibyan, dan Maat (2017) bahwa kolaborasi *pentahelix* mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan *pentahelix* berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. Berikut peran masing-masing unsur *pentahelix* menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya (2016) dalam Siti Nurulwahida (2019):

1. Pemerintah

Pemerintah pada model *pentahelix* berperan sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan objek. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, Undang-Undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengkoordinasi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan Kolaborasi tersebut.

2. **Pebisnis**

Bisnis pada model *pentahelix* berperan sebagai *enabler*. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bisnis berperan sebagai *enabler* yang menghadirkan infrastruktur, dengan mendukung perubahan pada sumber daya manusia bussines dalam *kolaboratif governance* selain itu juga berperan sebagai promotor atau seumbangi anggaran dalam memberikan nilai tambah atau pemasukan berupa pendanaan dalam pengembangan sektor tersebut.

3. **Akademisi**

Akademisi pada model *penta helix* berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan standarisasi proses pada kegiatan yang dilakukan serta sertifikasi dan keterampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan penggunaan konsep, teori-teori terbaru yang relevan dengan kegiatan atau sektor yang dikembangkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

4. **Media**

Media pada model *pentahelix* berperan sebagai expender, dalam hal

ini media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image*. Dalam program pengembangan kerjasama tersebut. Media dapat dikatakan sebagai unsur yang cukup berpengaruh dalam pengembangan wisata, hal itu karena pengaruh perkembangan jaman yang sangat modern sehingga teknologi dan media merajai sehingga apa yang diisukan di media menjadi topik yang cukup berpengaruh dan menimbulkan efek yang sangat bagus dalam pariwisata.

5. **Komunitas**

Komunitas pada model *pentahelix* berperan sebagai akselerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Komunitas juga bisa bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu proses pengembangan sektor tersebut. Komunitas disini bisa termasuk komunitas resmi ataupun masyarakat yang dimana mempunyai peran penting datang perkembangan kerjasama tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa *Penta Helix*

adalah model inovasi yang digunakan dalam rangka untuk meningkatkan atau mengangkat tingkat perekonomian suatu negara atau daerah yang didalamnya melibatkan lima *stakeholder* yaitu pemerintah, pebisnis (swasta), media, akademisi dan komunitas yang dimana kelima unsur tersebut mempunyai peran masing-masing dan pengaruh yang cukup besar sehingga apabila digabungkan dalam suatu kolaborasi dengan tujuan tertentu akan mendapat hasil yang lebih bagus dan maksimal.

E. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Rangka meningkatkan Pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid 19?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Rangka meningkatkan Pemberdayaan UMKM Eks Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid 19?

F. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan Implementasi Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Rangka Meningkatkan Pemberda-

yaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid 19.

- b. Menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid 19.

METODE

Menurut Sugiyono (2013:1) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Kemudian Prastowo (2016:24) mempertegas bahwa penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, melalui metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena metode ini lebih sesuai melalui permasalahan yang dibahas, tidak berkaitan melalui angka atau *numeric* dan peneliti bertujuan untuk mengetahui,

memahami serta memperdalam situasi Implementasi Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan UMKM EX Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid 19. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Pada dasarnya, deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptual dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini guna mengetahui lebih mendalam mengenai Implementasi Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid 19, berikut merupakan paparan analisis Implementasi Kolaborasi Model *Pentahelix* dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly pada masa Pandemi Covid 19:

Stakeholder pada model *Pentahelix* dalam pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly

1. Pemerintah

Pemerintah pada model *Penta Helix* berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki

peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan program, Undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengkoordinasi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly yang diberdayakan didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT). Salah satu contoh adalah Peran Pemerintah yang menyediakan media Promosi berupa akun instagram yang bernama @dollysaiki.surabaya.

Gambar 1
Sosial Media Instagram DS Point



Sumber : Instagram Dolly Saiki Point (@dollysaiki.surabaya)

Selain promosi pemerintah juga memiliki peran sebagai regulator yang mengeluarkan kebijakan dalam pembukaan DS Point.

Gambar 2
Pamflet Pembukaan Dolly Saiki Fest 2017



Sumber : <https://surabaya.go.id/id/agenda/35803/dolly-saiki-fest-2017>

Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan objek. Hal ini sudah sesuai dengan hasil penelitian peneliti dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan penutupan lokalisasi dolly dan membuka DS Point guna melakukan pemberdayaan masyarakat ex lokalisasi Dolly dengan melakukan kolaborasi bersama *stakeholder pentahelix* (akademisi, media, bisnis, komunitas).

2. Akademisi

Akademisi pada model *Penta Helix* berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan keterampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dengan bisnis yang dikembangkan pada pelaku UMKM Ex Lokalisasi Dolly yang diberdayakan didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) untuk mendapatkan keunggulan

kompetitif yang berkelanjutan. Sehingga peran akademisi disini adalah berbagi informasi dengan pelaku UMKM. Salah satu contoh Peran Akademisi dalam hal pemberdayaan adalah dengan pemberian Ide Kemasan Produk.

Gambar 3
Perbandingan Kemasan Produk Samijali



Sumber : Instagram @dolly.samijali

Kemasan Baru tahun 2020

Berdasarkan teori model *pentahelix* akademisi berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan keterampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dengan bisnis yang dikembangkan pada pelaku UMKM Ex Lokalisasi Dolly yang diberdayakan didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) Kemasan lama tahun 2017 Sumber: Instagram @dolly.samijali Kemasan Baru tahun 2020 Gambar 3 Perbandingan Kemasan Produk Samijali untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hal ini sudah sesuai dengan hasil penelitian peneliti dimana akademisi sudah cukup baik melakukan peran nya dengan memberikan ide dan gagasan

dalam perbaharuan ide kemasan produk dengan cara merubah kemasan lama salah satu contoh produk UMKM Ex Lokalisasi Dolly dengan mengikuti perkembangan zaman serta alur bisnis yang semakin baru.

3. Bisnis

Bisnis pada model *Penta Helix* berperan sebagai *enabler*. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam program meningkatkan pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) yang memiliki peran sebagai bisnis adalah pelaku UMKM Ex Lokalisasi didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) sedangkan pihak swasta tidak memegang peran sama sekali, dikarenakan untuk unsur permodalan bagi para penggiat UMKM Ex Lokalisasi Dolly sepenuhnya sudah diatasi oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Koperasi Kota Surabaya. Salah satu contoh Peran Bisnis dalam hal pemberdayaan adalah dengan melakukan penjualan guna menggerakkan alur proses bisnis. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan penjualan yang dilakukan oleh pelaku UMKM Ex Lokalisasi Dolly:

Gambar 4
Dokumentasi Kegiatan Penjualan Pelaku UMKM Ex Lokalisasi Dolly



Sumber: Instagram @dolly.samijali & @wayahendolly

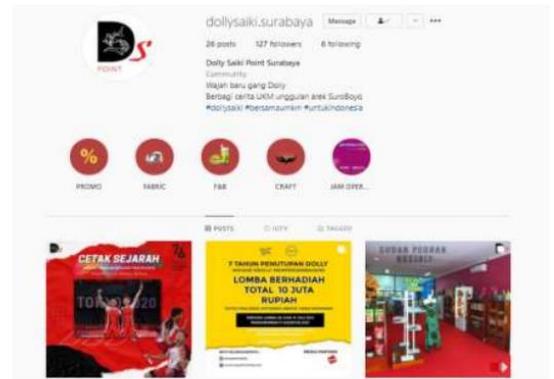
Berdasarkan teori model *pentahelix* bisnis berperan sebagai *enabler*. Pelaku UMKM memainkan peran sebagai penentu strategi dalam mengembangkan bisnis. Pelaku UMKM ini adalah sebagai entitas utama dalam mengembangkan UMKM Ex Lokalisasi didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) karena mereka menjalankan roda ekonomi melalui usaha yang digeluti. Kreativitas yang dimiliki oleh pelaku UMKM merupakan modal utama dan nilai jual utama dari produk yang mereka jual. Kreativitas pelaku UMKM harus selalu ditingkatkan agar dapat memenuhi permintaan pasar dan bersaing secara global. Dengan adanya model *Penta Helix* maka dapat menggerakkan para pelaku UMKM untuk lebih meningkatkan kreativitas, ide, dan keterampilan melalui kolaborasi yang tercipta dengan berbagai *stakeholder*. Hal ini sudah sesuai dengan hasil penelitian peneliti dimana bisnis sudah cukup baik melakukan perannya dengan menggerakkan roda perekonomian di sekitar wilayah UMKM Ex Lokalisasi

Dolly dengan mengikuti perkembangan zaman serta alur bisnis yang semakin baru.

4. Media

Media pada model *Penta Helix* berperan sebagai *expenders*. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image*. Dalam program pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) yang mendukung peran media adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Instagram sebagai media untuk promosi dan informasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung peran media dalam program pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) melalui instagram @dollysaiki.surabaya. Instagram tersebut ada sejak tahun 2020. Dalam instagram tersebut memuat informasi tentang program pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT), berita-berita tentang UMKM, dan produk yang dijual seperti kuliner (olahan kripik, tempe, dll), konveksi (baju, celana, alas kaki), dan lainnya. Berikut merupakan informasi tentang program pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) dalam instagram @dollysaiki.surabaya:

Gambar 5
Instagram @dollysaiki.surabaya



Sumber : Instagram Dolly Saiki Point (@dollysaiki.surabaya)

Berdasarkan teori model *pentahelix* media berperan sebagai *expenders*. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image* dalam program pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT). Hal ini sudah sesuai dengan hasil penelitian peneliti dimana media melakukan promosi guna menarik minat pengunjung dalam proses pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT).

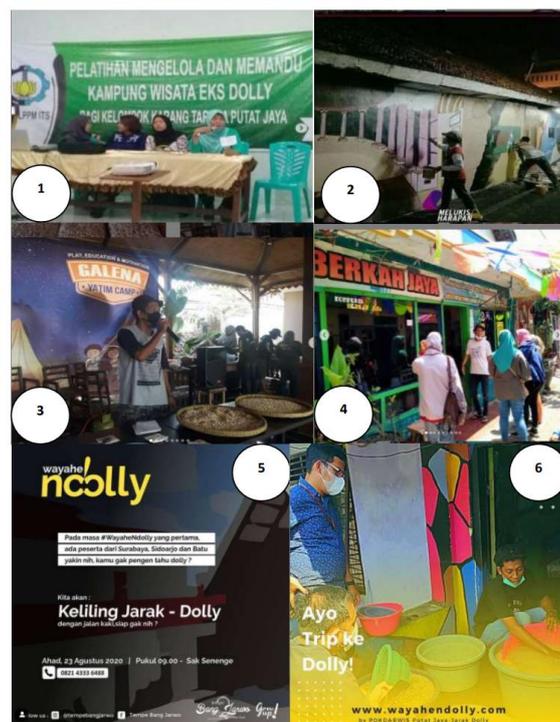
5. Komunitas

Komunitas pada model *Penta Helix* berperan sebagai *akselerator*. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) dalam

keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses bisnis ke era digital. Komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan UMKM. Dalam program pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) yang memiliki peran sebagai komunitas yang menaungi UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) adalah GMH (Gerak Melukis Harapan).

Peran GMH pada pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) adalah memberikan kontribusi melalui program pengembangan ekonomi yang dinamakan Wayah e Ndolly. Program yang dilakukan GMH dalam mengembangkan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) melalui riset terlebih dahulu, selanjutnya dari hasil riset tersebut dijadikan pedoman untuk mengembangkan UMKM. GMH juga berkontribusi dalam memberikan pelatihan, dimana dalam pelatihan ini menjelaskan tentang pola-pola untuk pemasaran. Sehingga para pelaku UMKM mengetahui bagaimana pola-pola pemasaran agar tergerak untuk memperluas pasar. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh GMH:

Gambar 6
Dokumentasi Kegiatan Komunitas GMH



Sumber : Instagram @wayahendolly, @tempebangiarwo, @melukisharapan

Keterangan pada gambar:

1. Pelatihan dan Pendampingan yang dilakukan oleh GMH dalam meningkatkan Pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly.
2. Pendampingan warga Ex Lokalisasi Dolly dalam kegiatan Cat Mural di lokasi Ex Lokalisasi Dolly.
3. Pelatihan Pengolahan Tempe yang dilakukan oleh anggota komunitas GMH yaitu Tempe Jarwo.
4. Pelaksanaan Program Wayah e Ndolly yang didampingi oleh anggota GMH bagi Pengunjung.
5. Promosi Kegiatan Wayah e Ndolly di Instagram.

6. Kunjungan wisata dari program Wayah e Ndolly ke Sentra Pembuatan Tempe Jarwo.

Komunitas pada model *Penta Helix* berperan sebagai *akselerator*. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT) dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses bisnis ke era digital. Hal ini sudah sesuai dengan hasil penelitian peneliti dimana media melakukan promosi guna menarik minat pengunjung dalam proses pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly didalam naungan Dolly Saiki Point (DS POINT).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus DS Point) peneliti menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh para aktor *penta helix* sudah cukup baik serta kolaborasi yang tercipta diantara mereka sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dengan ketidakmampuan bagi para aktor untuk

berdiri sendiri dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly. Hal tersebut juga membawa dampak yang baik bagi para pelaku UMKM Ex Lokalisasi Dolly dalam naungan DS Point.

Dalam pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly dibawah naungan Ds Point yang melibatkan 5 (lima) aktor kepentingan yaitu: Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Media, dan Kelompok Kepentingan/Komunitas. Dari hasil penelitian diketahui bahwa elemen Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dan dominan yaitu dengan melakukan seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pemberdayaan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, serta program-program.

Dalam pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly dibawah naungan Ds Point pemerintah melakukan peran melalui dinas terkait yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Akademisi melalui mahasiswi dari Universitas Veteran Jawa Timur Surabaya cukup berperan aktif dengan memberikan bantuan berupa ide beserta konsep terutama dalam hal kemasan. Bisnis melalui pelaku UMKM Ex Lokalisasi sendiri selaku penggerak dalam alur pengelolaan bisnis sudah berjalan dengan baik bahkan bisnis merupakan sektor yang sangat diperhatikan, dikarenakan jika tidak ada pelaku UMKM Ex Lokalisasi bisa dipastikan Ds Point tidak akan berjalan sehingga alur pergerakan bisnis akan terhenti. Media sudah

melakukan perannya dengan baik sebagai *expenders*, pemekar, media pendukung publikasi dan promosi produk ataupun lokasi Ex Lokalisasi Dolly sebagai tempat wisata dan Ds Point sebagai tempat sentra oleh-oleh hasil olahan warga pelaku UMKM Ex Lokalisasi Dolly. Dan yang terakhir komunitas, disini komunitas sudah berperan dengan sangat baik, Komunitas GMH (Gerak Melukis Harapan) berperan guna memberikan ide dan konsep serta melakukan pelatihan kepada para pelaku UMKM Ex Lokalisasi Dolly dan warga sekitar guna meningkatkan *softskill* dan kualitas sdm di UMKM Ex Lokalisasi Dolly.

Namun demikian sejauh ini dalam proses pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly juga terdapat faktor pendukung hingga faktor penghambat. Salah satu faktor faktor penghambat dalam proses pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly dibawah naungan Ds Point adalah adanya pandemi saat ini. Dikarenakan seluruh kegiatan baik pembangunan maupun kunjungan wisatawan seluruhnya dibatasi bahkan dihentikan sesuai dengan arahan pemerintah kota. Faktor penghambat lainnya juga muncul dari masyarakat sekitar yang pasif dalam proses pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly, masyarakat sekitar lebih menginginkan hal yang instan dalam terwujudnya UMKM Ex Lokalisasi Dolly tersebut. Faktor pendukung terdapat dari pemerintah dimana mendukung secara penuh mulai dari konsep,

pembangunan hingga anggaran kebutuhan dalam proses pembangunan UMKM Ex Lokalisasi Dolly.

Maka dari itu, pentingnya peran aktor *penta helix* dalam pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly. Apabila seluruh aktor menjalankan perannya dengan baik dan lebih maksimal, maka proses pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly dibawah naungan Ds Point dapat terwujud dengan lebih baik lagi. Serta diharapkan dapat meminimalisir faktor penghambat yang telah terjadi.

SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan pengembangan UMKM Ex Lokalisasi dibawah naungan Ds Point diperlukan beberapa perbaikan terutama dalam kolaborasi antar aktor agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan pemberdayaan, seperti contoh aktor akademisi dan komunitas memiliki peran yang hampir serupa dalam pelaksanaannya sehingga dikhawatirkan hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan didalam proses pemberdayaan.
2. Perlunya penguatan terhadap masing-masing aktor penta helix agar dapat menjalankan perannya menjadi lebih baik.
3. Dalam proses pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly diperlukan masterplan, terutama di masa pandemi seperti ini.

4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses pengembangan UMKM Ex Lokalisasi Dolly.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nurulwahida, S. (2019). Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Model Pentahelix Dalam Pengembangan Wisata Heritage Kajoetangan di Kota Malang. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Praswati, A. N. (2017). Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi. Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2017 "Perkembangan Konsep dan Riset EBusiness di Indonesia" (pp. 690-705). Surakarta: ISBN: 978-602-361-067-9.

Putri, F. T. (2019). Koordinasi Antar Stakeholder Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Bandung: Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

S, D. K. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo.

<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74627>

Saputri, F. W. (2020). Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus pada Talang Indah Fajaresuk). Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Syifa, F. N. (2019). Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Bandung: <http://repository.stp-bandung.ac.id/handle/123456789/1089?show=full>.

Winanti, W. M. (2020). New Normal Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yumaz, N. S. (2019). Implementasi Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 37-46.

Yusron Fahmi Liputan 6.com. (2021). Catat 20,832 Kasus Positif, Cek Sebaran Covid-19 di Surabaya Hari Ini. <https://surabaya.liputan6.com/read/4486164/catat-20832-kasus-positif-cek-sebaran-covid-19-di-surabaya-hari-ini>.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyadi-detikfinance, A. D. (2020). Risma Buka-bukaan Dampak Corona ke Pengusaha Surabaya.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5028596/risma-bukabukaan-dampak-corona-ke-pengusaha-surabaya>.

Astuti, A. P. (2017). Kebijakan Walikota Surabaya Dalam Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya Tahun 2014. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

BPS Kota Surabaya. (2020). Kecamatan Sawahan Dalam Angka 2020. Surabaya: <http://surabayakota.bps.go.id>.

Cornelius Herdita Aries Permana, D. P. (2014). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Analisis Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat). <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/6196>, 1-19.

FADHUL. (2019). Faktor-Faktor Penghambat Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya. (2019). Panduan Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Nurmalia, A. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dengan Model Penta Helix (Studi pada UKM Sentra Bordir dan Konfeksi Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus). Yogyakarta: